

---

## PENERAPAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI UNTUK MONITORING KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA BOGOR TERKAIT PEMBAYARAN PBB P2

Ignatius Alberto<sup>1\*</sup>, Patar Simamora<sup>2</sup>, Dessy Herlisnawati<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Manajemen Perpajakan, Sekolah Vokasi, Universitas Pakuan

[ignatiusalbert76@gmail.com](mailto:ignatiusalbert76@gmail.com), [patar.simamora@unpak.ac.id](mailto:patar.simamora@unpak.ac.id), [dessyherlisnawati@gmail.com](mailto:dessyherlisnawati@gmail.com)

### ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pendapatan bagi negara yang cukup berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Pemerintah diharapkan untuk mengelola pajak dengan baik agar terwujud pembangunan yang maksimal. Salah satu cara mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib yang pada saat ini justru salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan alat bantu ArcGIS berupa ArcGIS maka akan mempermudah pengguna untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan data/fakta yang terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk membantu pemerintah dalam memonitoring tingkat kepatuhan masyarakat agar dapat ditemukan solusi bagaimana cara mengedukasi masyarakat dalam hal peningkatan tingkat kepatuhan dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Penelitian ini digunakan juga untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait PBB P2. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi. Pengamatan (observasi) dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode survey. Teknik yang digunakan adalah dengan memberikan kuesioner yang disusun di aplikasi milik Esri yaitu ArcGIS Survey123 yang termasuk dalam kuesioner tertutup Hasil penelitian disajikan dalam bentuk dashboard monitoring pembayaran PBB P2 dalam aplikasi ArcGIS Dashboard. Lapisan masyarakat kota Bogor yang diteliti beragam mulai dari remaja hingga pada jenjang orang dewasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% daripada lapisan masyarakat di kota Bogor patuh dalam membayar PBB P2. Namun sayangnya 30% dari responden tidak patuh dalam membayar pajak dengan berbagai alasan yang mendukung.

Kata kunci : Sistem Informasi, Geografis, Monitoring, PBB P2, Bogor.

### ABSTRACT

*Land and building tax is one of the factors of income for the state that contributes significantly to regional income. The government is expected to manage taxes properly in order to achieve maximum development. One way to optimize land and building tax revenue is by increasing taxpayer compliance, which is currently one of the obstacles that can hinder the effectiveness of tax collection. This study uses ArcGIS tools, which will make it easier for users to make decisions based on data/facts. This research aims to assist the government in monitoring the level of compliance among the public in order to find solutions on how to educate the public on increasing compliance in the payment of Land and Building Tax in rural and urban areas (PBB P2). This study is also used to evaluate government policies related to PBB P2. This study uses the data collection method of observation. Observations were conducted directly using the survey method. The technique used was to distribute questionnaires designed in Esri's ArcGIS Survey123 application, which is part of a closed-ended questionnaire. The research results are presented in the form of a PBB P2 payment monitoring dashboard for PBB P2 payments in the ArcGIS Dashboard application. The urban community in Bogor City studied is diverse, ranging from teenagers to adults. The results show that 70% of the urban community in Bogor City are compliant in paying PBB P2. Unfortunately, 30% of respondents are non-compliant in paying taxes for various reasons.*

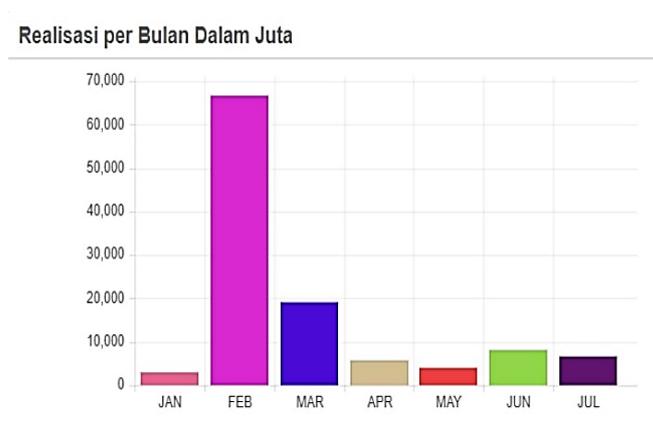
*Keywords: Information System, Geographic, Monitoring, PBB P2, Bogor.*

## PENDAHULUAN

Sektor pajak merupakan salah satu sumber dana pembangunan. Pajak juga digunakan untuk membiayai pembangunan serta pelayanan. Perpajakan memiliki peraturan pelaksanaan dalam perundang-undangan Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila dijalankan pemerintahan yang baik dan dilaksanakan pembangunan di segala bidang. Ada indikator dari suatu negara yang dianggap maju [2-3]. Suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara maju karena mampu membangun negara dengan baik dari segi fisik maupun non fisik. Hal ini harus didukung oleh pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan bagi negara adalah pajak daerah [4-5]. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat [11-15]. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana ini digunakan untuk memajukan dan mengembangkan daerah. Bila kita rutin membayar pajak maka pembangunan sarana umum lebih mudah terealisasi [6-10].

Salah satu sektor daripada Pajak Daerah yang diperoleh yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini merupakan faktor penghasilan bagi negara yang cukup berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Pemerintah diharapkan untuk mengelola pajak dengan baik guna terwujudnya pembangunan yang maksimal. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah salah satu cara dalam mengelola pajak. Namun kepatuhan inilah yang menjadi masalah dalam pengelolaan pajak. Masalah kepatuhan menjadi masalah klasik yang dihadapi hampir seluruh negara yang menerapkan sistem perpajakan bagi warganya. Jika wajib pajak kurang aktif dalam membayar pajak maka menghambat realisasi pajak tersebut [20].

Selain itu karena sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah self- assessment system dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya bertugas melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan [1]. Akibat daripada sistem tersebut adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Dibutuhkan dukungan dari 10 masyarakat dalam hal ketaatan membayar pajak daerah adalah sebagai salah satu bentuk peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, melalui ketaatan masyarakat dalam membayar pajak daerah dapat meningkatkan sumber-sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pembangunan [17-18]. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut memicu rendahnya realisasi penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak adalah penerimaan pajak yang nyata (tidak fiktif) [19]. Artinya pajak ini benar-benar diterima sebagai capaian pada periode tertentu yang akan dibandingkan pada target penerimaan pajak.



Gambar 1. Grafik Realisasi Penerimaan PBB Periode Januari-Juli 2022

Berdasarkan grafik dari Bappenda Kota Bogor (<https://pospbb.bogorkota.net/eis/>) terlihat realisasi PBB

Kota Bogor pada tahun 2022. Realisasi tertinggi dicapai pada bulan Februari 2022 yaitu sebesar Rp 66,952,863,386. Sementara untuk realisasi pajak beberapa bulan lainnya terbilang cukup rendah. Untuk realisasi terendah yaitu sebesar Rp 3,233,950,589 pada bulan Januari. Realisasi Penerimaan PBB selama periode Januari s.d Juli 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Realisasi Per Bulan PBB Periode Januari s.d Juli 2022	
EIS-PBB Kota Bogor ( <a href="https://pospbb.bogorkota.net/eis/">https://pospbb.bogorkota.net/eis/</a> )	
Bulan	Realisasi (dalam juta)
Januari	Rp 3,233,950,599
Februari	Rp 66,952,863,386
Maret	Rp 19,388,507,949
April	Rp 5,959,509,964
Mei	Rp 4,299,559,512
Juni	Rp 8,368,282,717
Juli	Rp 8,295,738,304

Gambar 2. Realisasi Per Bulan PBB Periode Januari s.d Juli 2022

Esri Indonesia adalah perusahaan yang bergerak pada bidang Sistem Informasi Geografi (SIG) mampu memberikan ArcGIS sebagai salah satu teknologi di bidang Sistem Informasi Geografi (SIG) yang dapat membantu pemerintah dalam memonitoring pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat.

Salah satu hal yang harus dimonitori yaitu tingkat kepatuhan masyarakat itu sendiri. Data spasial yang dihasilkan melalui software GIS mampu untuk memperlihatkan berapa banyak wajib pajak dalam sektor perkotaan bahkan provinsi. Informasi spasial ini dapat digunakan dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikonversi menjadi diagram yang mampu menarik kesimpulan terkait data yang telah dikumpulkan. Berikut adalah beberapa alasan yang mendukung mengapa GIS digunakan dalam analisis :

- Kebutuhan akan analisis data yang akurat dan efisien,
- Pengolahan data yang mudah karena didukung oleh perangkat lunak
- Data yang belum diungkap dapat dilihat secara tiga dimensi
- Data dapat tersinkronasi secara otomatis.

Maka berdasarkan uraian di atas, untuk menyajikan laporan tugas akhir dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk Monitoring Kepatuhan Masyarakat Terkait Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)”.

## METODE PENELITIAN

Data Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu melalui kuesioner (angket). Membuat survey menggunakan ArcGIS Survey123. Responden mengisi kuesioner tersebut. Narasumber yang telah mengisi kuesioner tersebut kurang lebih 15-20 orang. Para narasumber yang mengisi kuesioner berasal dari beberapa wilayah kota Bogor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

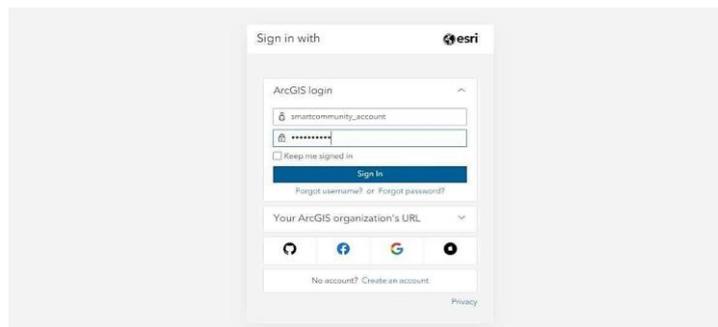
Penerapan Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk Monitoring Kepatuhan Masyarakat Kota Bogor Terkait Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Pemanfaatan SIG dalam bidang perpajakan dapat dilakukan dengan memonitori kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Adapun peralatan yang dibutuhkan yaitu Komputer. Ada juga perangkat lunak (software) yang digunakan yaitu ArcGIS Online. Perangkat lunak ini dapat diakses melalui web browser pada perangkat komputer. Ada dua aplikasi pada ArcGIS Online yang

digunakan antarlain ArcGIS Survey123 dan ArcGIS Dashboard. Adapun hal penting yang harus dipersiapkan adalah data. Sumber data yang dimasukan di dalam dashboard berdasarkan pada hasil survey yang sudah diisi oleh responden yaitu masyarakat kota Bogor. Survey dapat diakses melalui laman <https://arcg.is/1jmiHq>.

Tata Cara Membuat Survey Melalui ArcGIS Survey123

Berikut ini adalah tata cara dalam membuat survey melalui ArcGIS Survey123 :

- A. Buka website ArcGIS Online pada laman <https://www.arcgis.com> dan masuk menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Peneliti menggunakan akun yang diberikan perusahaan Esri Indonesia untuk mengakses ArcGIS Online.



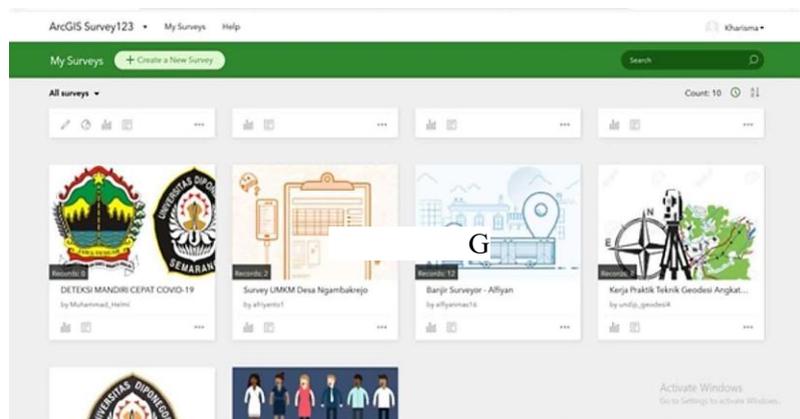
Gambar 3. Laman Sign In ArcGIS Online

- B. Klik pada icon All Apps , lalu klik Survey123



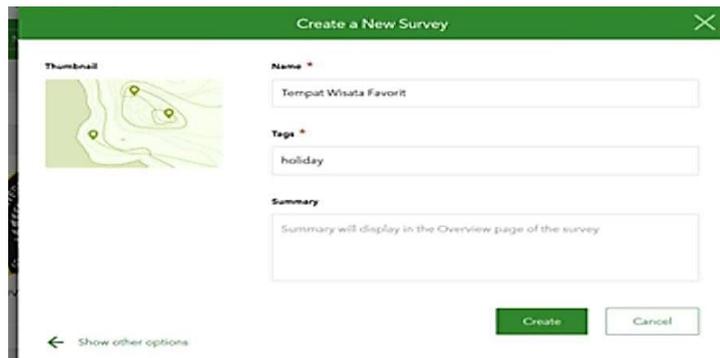
Gambar 4. Laman ArcGIS Online

- C. Pilih menu “Create A New Survey” yang ada pada ujungsebelah kiri dekat tulisan My Survey.



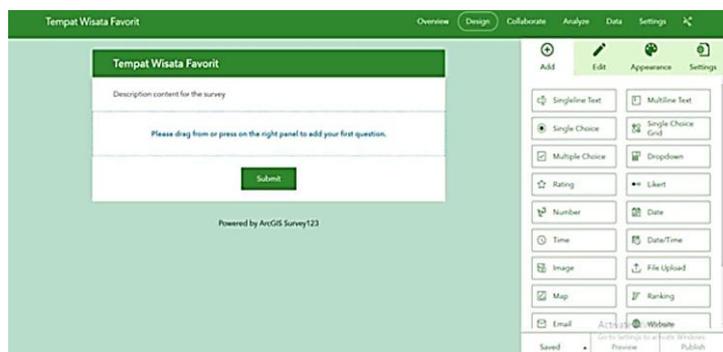
Gambar 5. Laman ArcGIS Survey123

- D. Kemudian berikan nama dan *hashtag* (wajib diberikan) besertaringkasan dari hal apa yang ingin dibuatkan survey (opsional).



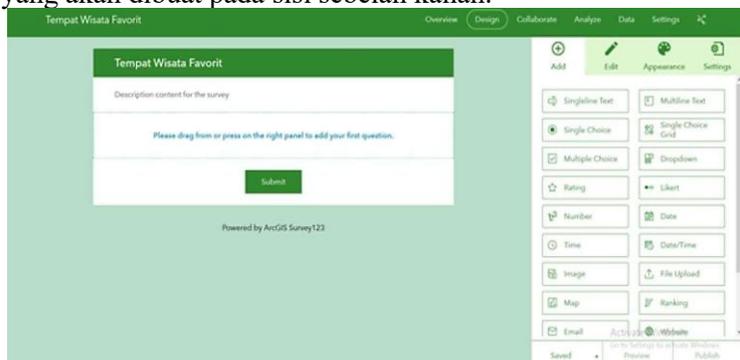
Gambar 6. Membuat Survey Baru

E. Berikut adalah tampilan awal dari draft survey yang sudah dibuat. Pertanyaan dapat dibuat dengan memilih tipe pertanyaan apa yang akan dibuat pada sisi sebelah kanan.



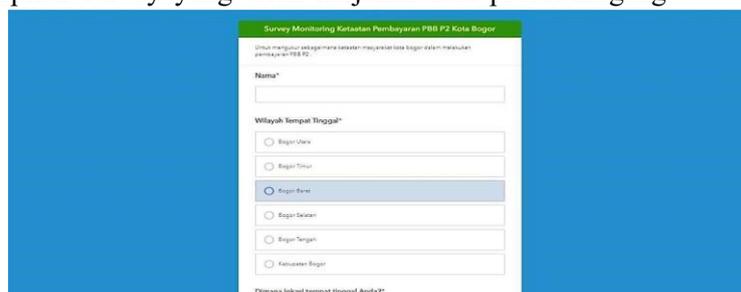
Gambar 7. Laman Membuat Survey Baru

F. Berikut adalah tampilan awal dari draft survey yang sudah dibuat. Pertanyaan dapat dibuat dengan memilih tipe pertanyaan apa yang akan dibuat pada sisi sebelah kanan.



Gambar 8. Laman Membuat Survey Baru

G. Berikut adalah tampilan survey yang telah dikerjakan saat proses magang.

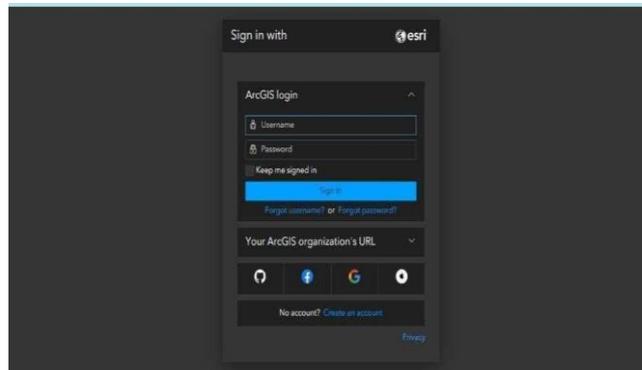


Gambar 9. Laman Survey Monitoring Pembayaran PBB

**Tata Cara Pembuatan Dashboard**

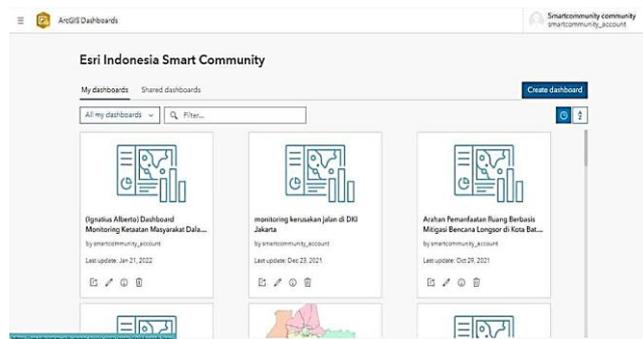
Berikut ini adalah tata cara dalam membuat Dashbord melalui ArcGISDashboard :

- A. Menyiapkan alat & perangkat lunak yang dibutuhkan yaitu Laptop. Untuk perangkat lunak yang digunakan yaitu ArcGIS Online. Perangkat lunak ini dapat diakses melalui <https://www.arcgis.com/>. Lalu masuk (sign in) menggunakan akun yang sudah didaftar pada ArcGIS Online dengan memasukkan *username* dan *password*. Lalu tekan menu **Sign In**.



Gambar 10. Laman Sign In ArcGIS

- B. Langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi DashboardArcGIS. Aplikasi tersebut dapat diakses pada laman ArcGIS Online. Klik Icon **All Apps >> Dashboard**.

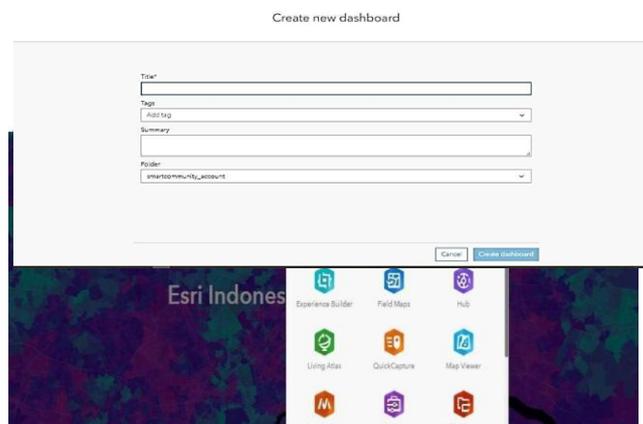


Gambar 11. Laman menu ArcGIS Online

- C. Lalu pilih menu **Create Dashboard**

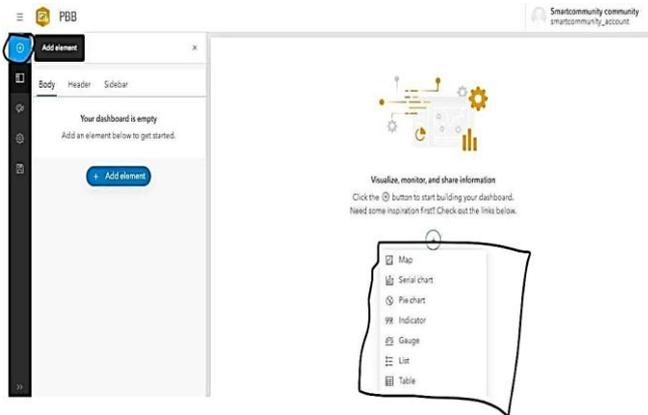
Gambar 12. Laman Dashboard

- D. Lalu setelah itu isi *Title* dengan judul proyek yang ingin dikerjakan. Setelah itu isi *Tags* dengan kata kunci, misalnya : pajak, pbb, dan seterusnya. Lalu isi *Summary* dengan ringkasan mengenai proyek yang akan dikerjakan. Jangan lupa untuk mengisi folder yang akan digunakan untuk menyimpan project.



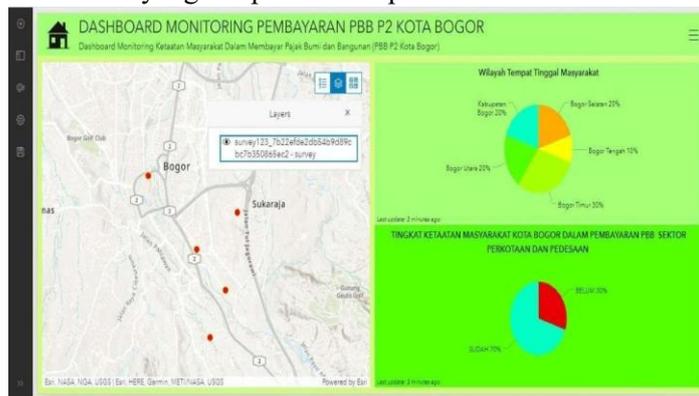
Gambar 13. Membuat Dashboard Baru

E. Lalu kita akan masuk pada tampilan halaman utama Dashboard. Klik menu **Add Element** untuk menambahkan informasi yang ingin ditampilkan. Untuk proyek ini memilih *maps* dan *pie chart* (diagram lingkaran).



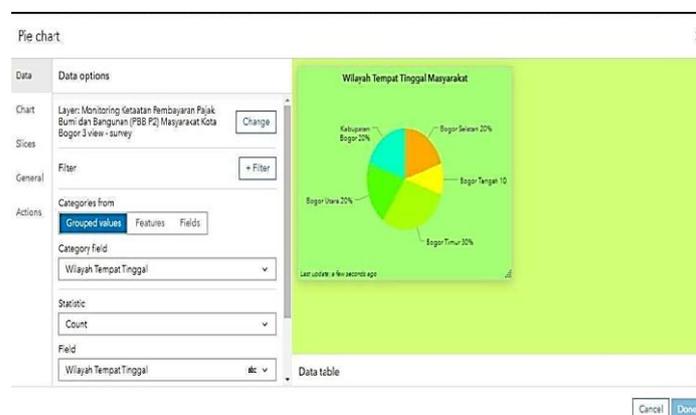
Gambar 14. Laman Dashboard Baru

F. Untuk maps memilih lokasi Kota Bogor. Jangan lupa untuk menambahkan layer sebagai legenda peta. Ini bertujuan untuk melihat informasi yang diinput oleh responden.



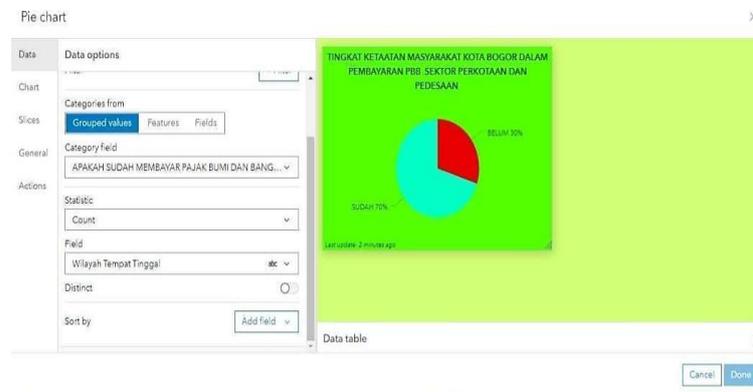
Gambar 15. Laman Dashboard Monitoring PBB

G. Diagram lingkaran membuat tambahan informasi berupa persebaran wilayah tempat tinggal masyarakat. Data yang ada pada diagram lingkaran berasal dari layer yang sama dengan peta. **Category Field** yang dipilih adalah “Wilayah Tempat Tinggal” saja. Kemudian untuk perhitungan presentase dapat dipilih pada menu **Statistic >> Count**



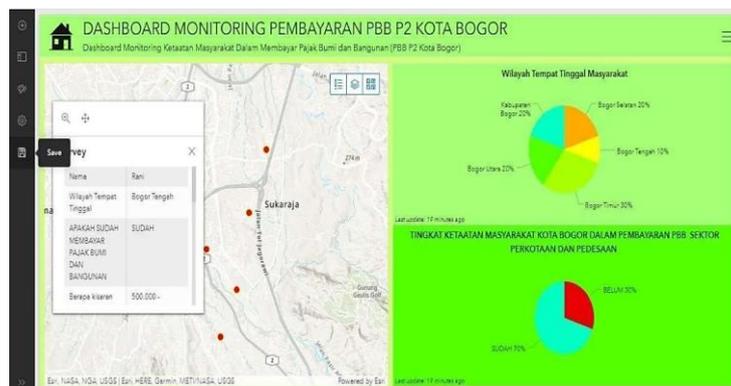
Gambar 16. Membuat Diagram Wilayah Tempat Tinggal

H. Hal yang sama pada diagram untuk tingkat kepatuhan masyarakat kota Bogor. Namun untuk *category field* yang dipilih bukan hanya satu saja melainkan **“Wilayah Tempat Tinggal”** dan **“Apakah Sudah Membayar Tepat Waktu?”**



Gambar 17. Pembuatan Pie Chart TingkatKepatuhan

I. Langkah terakhir adalah memberi nama pada Dashboard dan menekan menu **Save** untuk menyimpan dashboard yang telah dikerjakan. Selesai.



Gambar 18. Hasil Pembuatan Dashboard

Aplikasi ArcGIS dapat membantu dari segi pencatatan titik geografis daripada objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Aplikasi ArcGIS Survey123 adalah salah satu media dalam mengumpulkan data responden. ArcGIS Dashboard memiliki peran dalam menampilkan peta persebaran objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Aplikasi dashboard ini juga menampilkan bagaimana persentase kepatuhan wajib pajak.

Penggunaan aplikasi ArcGIS Survey123 merupakan media yang cocok dalam mengumpulkan data terkait PBB. Indikator-indikator yang dianalisis antara lain : lokasi objek pajak , besarpajak yang dibayarkan , alasan belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan ketepatan waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Aplikasi ArcGIS Dashboard memiliki tampilan daftar fitur (menu) ditampilkan mudah digunakan. Proses pengolahan data pun mudah dan efektif . Aplikasi ArcGIS Dashboard sangat cocok bila ingin menampilkan data secara otomatis dalam skala besar.

Dari segi kepatuhan formal para responden ,70% responden dikatakan sudah taat dan patuh terhadap kewajiban formal perpajakannya dari segi waktu pembayaran PBB , namun 30% daripada responden dapat dikatakan belum patuh dikarenakan beberapa alasan yaitu belum memiliki uang karena terdampak pandemi , tidak terdapat baik kantor pos dan bank terdekat yang ditunjukkan berdasarkan kebijakan pemerintah.

Pada poin nomor (1) dijelaskan bahwa responden daripada masyarakat Kota Bogor tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar PBB. Ini mungkin diakibatkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tempat mereka bekerja atau sektor usaha mereka yang sedang turun pendapatannya. Alasan pada nomor (2) dan (3) adalah alasan yang cukup dibilang tidak masuk akal. Ini dikarenakan sudah ada modernisasi sektor perbankan dan e-commerce yang menyediakan jasa pembayaran PBB P2 secara daring cukup dengan koneksi internet. Dari ketiga alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan yang paling mempengaruhi wajib pajak Kota Bogor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah kurangnya sosialisasi pemerintah dalam bagaimana membayar pajak secara daring melalui sektor perbankan dan e-commerce. Dari segi data yang disajikan pada dashboard tersebut juga cukup sedikit dibandingkan dengan penelitian lainnya. Alasan dari beberapa calon responden yang ditemui yaitu mereka kurang percaya terhadap data yang mereka inputkan di survey karena takut disalahgunakan. Ada juga calon responden yang apatis ketika survey tersebut sudah disebar.

## **KESIMPULAN**

Sistem Informasi Geografi (SIG) dapat berperan dalam memonitori tingkat kepatuhan masyarakat kota Bogor dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan bantuan aplikasi ArcGIS Dashboard & ArcGIS Survey yang telah digunakan selama periode penelitian (magang). Dari kuesioner yang disebar dapat diperoleh informasi geografis dan hasil input responden. Penggunaan aplikasi ArcGIS Survey123 merupakan media yang cocok dalam mengumpulkan data terkait PBB. Aplikasi ArcGIS Dashboard memiliki tampilan daftar fitur (menu) ditampilkan mudah digunakan. Proses pengolahan data pun mudah dan efektif. Aplikasi ArcGIS Dashboard sangat cocok bila ingin menampilkan data secara otomatis dalam skala besar. Penggunaan aplikasi ArcGIS Survey123 merupakan media yang cocok dalam mengumpulkan data terkait PBB. Aplikasi ArcGIS Dashboard memiliki tampilan daftar fitur (menu) ditampilkan mudah digunakan. Penerapan Sistem Informasi Geografi dalam bidang perpajakan dapat dijalankan dengan baik dengan bantuan ArcGIS. Alat-alat yang disajikan dalam ArcGIS seperti ArcGIS Survey123 dan ArcGIS Dashboard mampu untuk memonitori kepatuhan wajib pajak dengan menampilkan informasi-informasi mengenai bagaimana kepatuhan masyarakat agar Pemerintah Kota Bogor dapat mengevaluasi kebijakan-kebijakan agar tercapainya target penerimaan PBB-P2.

Penelitian juga dilakukan secara daring sehingga peneliti cukup sulit untuk mengembangkan dashboard. Alasan-alasan yang disampaikan responden tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan yang paling mempengaruhi wajib pajak Kota Bogor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah kurangnya sosialisasi pemerintah dalam bagaimana membayar pajak secara daring melalui sektor perbankan dan e-commerce. Ada juga alasan yang tersirat yaitu tingkat kepercayaan yang rendah atas dana yang telah dibayarkan. Mereka cenderung mengalokasikan dana mereka bagi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh masyarakat dalam mematuhi peraturan perpajakan. Isu miring terkait penyalahgunaan pajak juga merupakan salah satu penyebab ketidakpatuhan wajib pajak. Pemerintah pun harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat agar tingkat partisipasi pajak tinggi sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat maksimal untuk pembangunan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Devano, S. d. (2006). *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana . hal - 109.
- [2] Endarto, Danang. dkk. 2009. *Geografi 3 : Untuk SMA/MA Kelas XII*. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- [3] Esri Indonesia. 2020. *The Science of Where*. PT Esri Indonesia, Jakarta.

- [4] Gistut. 1994. Sistem Informasi Geografis. Gramedia Pustaka Utama.
- [5] Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol. 1. No. 1.
- [6] Mandala, Harefa. 2016. *Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar. Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 7(1), 1-16.
- [7] Maulida, Rani. 2018. "Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan". <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-dan-bangunan>, diakses pada 21 Februari 2025 pukul 18.30.
- [8] Memahami Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan. 7 Juni 2021. <https://ayopajak.com/cara-menghitung-pajak-bumi-dan-bangunan/>, diakses pada 9 Maret 2022 23:59.
- [9] Nafiah, Zumrotun. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal STIE Semarang*.10 (1).
- [10] Napitupulu, Lucia Silveria, Novi Budiarmo. 2015. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 3(1),463-472.
- [11] Pravasanti, Y. A. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1),142-151.
- [12] Pratiwi, Hesti, Muhaimin, Wa Ode Rayyani. 2020. Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 24-32.
- [13] Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sekretaris Daerah Kota Bogor.
- [14] Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal : 141.
- [15] Rahman, Arif. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. (Skripsi, Universitas Negeri Padang, 2018) Diakses dari <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>.
- [16] Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Bogor.
- [17] Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- [18] Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol 4 (1) : Hal. 17.
- [19] Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
- [20] Puspita A, Yuningsih Y, Fahmi M, Wahyuni Y. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Barang Pada PT Bangun Prestasi Bersama Jakarta. *Jurnal Sistem Informas*., Vol 3(1) : Hal 35-45.